

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling esensial sekaligus bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Ketersediaan pangan menjadi komponen penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga harus terjamin setiap saat baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, gizi, maupun keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh rumah tangga memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh anggota keluarga, serta tidak menghadapi risiko kehilangan akses tersebut dalam jangka waktu tertentu (FAO, 2008)

Ketahanan pangan merupakan bagian dari agenda global *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*, khususnya tujuan kedua yang menargetkan penghapusan kelaparan, kerawanan pangan, dan malnutrisi (FAO et al., 2024). Berdasarkan laporan terbaru, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 8,2% atau sekitar 638–720 juta jiwa dari populasi global mungkin masih menghadapi kelaparan, angka tersebut menurun dibandingkan 8,5% pada 2023 dan 8,7% pada 2022. Penurunan ini didorong oleh perbaikan di Asia dari 8,1% pada tahun 2023 menjadi 6,7% atau sekitar 323 juta orang pada tahun 2024 serta Amerika Latin dan Karibia dari 6,2% pada tahun 2023 menjadi 5,1% pada tahun 2024. Namun, tren tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di Afrika karena tingkat kelaparan masih meningkat hingga melampaui 20% di tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan pada tingkat global, proyeksi menunjukkan sekitar 512 juta orang masih akan mengalami kekurangan gizi kronis pada tahun 2030, sehingga target *zero hunger* atau tanpa kelaparan diperkirakan belum sepenuhnya tercapai pada tahun 2030 (FAO et al., 2024).

Indonesia sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya menggantungkan diri pada sektor pertanian ternyata belum sepenuhnya terbebas dari persoalan kerawanan pangan. Berdasarkan data dari *The Economist Impact* (2022), Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dalam *Global Food Security Index (GFSI)* dengan skor 60,2, meningkat dari peringkat ke-68 dengan skor 59,8 pada 2021. Meskipun data terbaru tahun 2026 belum tersedia, target

skor GFSI Indonesia pada 2024 ditetapkan sebesar 69,8, sehingga diperlukan peningkatan sekitar 10,6 poin. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata global (62,2) dan kawasan Asia Pasifik (63,4), serta tertinggal dari beberapa negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) seperti Singapura (73,1), Malaysia (69,9), dan Vietnam (67,9). Kondisi tersebut terjadi karena Indonesia masih lemah pada dua dimensi ketahanan pangan yaitu dimensi kualitas dan keamanan pangan serta dimensi SDA dan resiliensi, sehingga skor GFSI Indonesia relatif rendah (Tono et al., 2023). Kondisi serupa juga tercermin pada tingkat wilayah, Badan Pangan Nasional (2023) mencatat bahwa sebanyak 67 kabupaten atau sekitar 16,11% dari total kabupaten di Indonesia masih memiliki skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang tergolong rendah, serta dua provinsi yang berada pada kategori serupa. Pada tahun 2023, prevalensi penduduk Indonesia yang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat mencapai 4,02% atau sekitar 11,2 juta (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerawanan pangan masih terjadi dan menjadi tantangan serius sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan merata di seluruh wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2012).

Permasalahan ketahanan pangan menjadi semakin kompleks di wilayah Pulau Madura karena wilayah tersebut didominasi oleh lahan kering dengan curah hujan yang relatif rendah, musim kemarau yang panjang, serta jenis tanah berkapur dan berpasir yang memiliki kemampuan menyimpan air terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua komoditas pertanian dapat dibudidayakan secara optimal, melainkan lebih sesuai untuk tanaman yang toleran terhadap kondisi kering, seperti jagung, tembakau, kacang-kacangan, dan beberapa jenis umbi-umbian (Setiawan et al., 2025). Salah satu komoditas hortikultura yang termasuk kelompok tanaman umbi lapis dan berkembang baik karena relatif toleran terhadap kondisi lahan kering adalah bawang merah. Komoditas ini banyak dibudidayakan di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, karena memiliki bentang lahan berupa perbukitan, beriklim relatif kering, serta didominasi tanah kapur dan berpasir sehingga mendukung pertumbuhan bawang merah. Hal itu dibuktikan oleh data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang (2026) yang mencatat total produksi bawang merah mencapai 399.885 kuintal pada tahun 2025, dengan 98,38% di antaranya berasal dari Kecamatan Sokobanah. Capaian tersebut

menempatkan Sokobanah sebagai salah satu sentra produksi bawang merah di Pulau Madura. Tingginya konsentrasi produksi tersebut menjadikan rumah tangga petani bawang merah sebagai kelompok yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam memahami keterkaitan antara keberhasilan produksi komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan kondisi ketahanan pangan rumah tangga.

Meskipun Kecamatan Sokobanah dikenal sebagai salah satu lumbung bawang merah di Madura dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, fenomena kerawanan pangan tetap dapat terjadi pada tingkat rumah tangga, terutama pada petani komoditas komersial seperti bawang merah. Petani bawang merah dihadapkan dengan tingkat risiko usaha yang relatif tinggi karena dipengaruhi oleh faktor produksi maupun faktor pasar. Dari sisi pasar, salah satu sumber ketidakpastian berasal dari fluktuasi harga jual di tingkat produsen. Berdasarkan data Direktorat Statistik Harga (2026) menunjukkan bahwa harga produsen bawang merah sepanjang tahun 2025 di Jawa Timur berfluktuasi antara sekitar Rp18.879/kg hingga Rp28.507/kg, dengan rata-rata tahunan Rp23.970/kg, sementara di tingkat nasional, harga juga bergerak cukup lebar, yakni sekitar Rp32.186/kg hingga Rp39.046/kg, dengan rata-rata tahunan Rp35.142/kg. Harga jual hasil panen yang tidak sebanding dengan tingginya biaya *input* produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida juga dapat menekan margin keuntungan yang turut menambah tekanan risiko bagi para petani (Ekowati et al., 2023). Dari sisi produksi, usaha tani bawang merah juga dipengaruhi oleh kondisi iklim, seperti perubahan curah hujan, suhu, dan musim tanam yang dapat meningkatkan risiko serangan organisme pengganggu tanaman, menurunkan produktivitas, bahkan menyebabkan gagal panen (Marmai et al., 2022; Sutiharni et al., 2024). Kombinasi antara fluktuasi harga, tingginya biaya produksi, dan ketidakpastian hasil panen menyebabkan pendapatan bersih yang diterima oleh petani menjadi tidak stabil, bahkan merugi, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memperluas usahanya, melakukan investasi usaha tani, bahkan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga mereka seperti kebutuhan pangan (Sinulingga et al., 2025). Menurut Izni (2024), ketidakstabilan harga bisa menyebabkan penurunan pada pendapatan petani, sehingga ketika pendapatan menurun akan menyebabkan penurunan daya beli dan pada akhirnya petani terpaksa menyesuaikan pola konsumsi maupun mencari sumber penghasilan tambahan di luar sektor pertanian. Dengan demikian, tingginya produksi bawang merah di suatu wilayah tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga petani.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang (2024) menunjukkan bahwa skor IKP Kabupaten Sampang mencapai 77,08 yang tergolong tahan pangan. Namun demikian, tingkat kemiskinan di wilayah ini masih relatif tinggi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 214,3 ribu jiwa atau 20,8% dari total penduduk, jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional yang berada di kisaran 9%. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp491.753 per kapita per bulan, rumah tangga miskin di Sampang hanya memiliki pengeluaran sekitar Rp16.000–17.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan, keterbatasan daya beli ini menyebabkan rumah tangga miskin menghadapi tekanan dalam akses pangan sehingga rentan terhadap kelaparan jika harga pangan naik. Dalam kondisi tersebut, rumah tangga cenderung melakukan penyesuaian konsumsi, seperti mengurangi kualitas dan kuantitas makanan, yang tercermin dalam prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Sampang sebesar 9,44%, meskipun lebih rendah dibandingkan Pamekasan dan Bangkalan, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk yang juga merupakan sentra produksi bawang merah (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025). Dengan demikian, meskipun Kabupaten Sampang merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Madura dengan produksi yang tinggi, ternyata masih menghadapi masalah ketidakcukupan konsumsi pangan pada tingkat rumah tangga. Keterbatasan daya beli akibat ketidakstabilan pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi menyebabkan rumah tangga menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam kondisi tersebut, pada akhirnya mendorong rumah tangga untuk menerapkan strategi penanggulangan pangan (*food coping strategy*) sebagai bentuk respons adaptif guna mempertahankan kelangsungan hidup, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan (Rahmat, 2025).

Mutiara (2008) menjelaskan bahwa strategi coping umumnya dilakukan oleh rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan, dengan pola yang sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Strategi tersebut dapat berupa pendekatan berbasis pangan, seperti mengonsumsi makanan yang lebih murah atau mengurangi porsi makan, maupun pendekatan non pangan, seperti mencari pekerjaan tambahan, berutang, atau menjual aset produktif yang menggambarkan tingkat kerawanan pangan rumah tangga (Lybaws et al., 2022). Tingginya intensitas *coping strategy* mencerminkan tingkat kerawanan pangan rumah tangga yang semakin berat begitu pula sebaliknya (Tanziha et al., 2010).

Walaupun studi mengenai ketahanan pangan telah banyak dilakukan, masih terdapat celah empiris yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian Melese et al (2021) di Ethiopia menggunakan regresi logistik dan *Coping Strategy Index* (CSI) menunjukkan bahwa luas lahan, pendidikan kepala keluarga, serta akses kredit berpengaruh signifikan dalam menurunkan risiko kerawanan pangan, dengan strategi utama berupa konsumsi pangan yang lebih murah dan kurang disukai, partisipasi dalam pekerjaan di luar pertanian, meminjam makanan dan membatasi konsumsi makanan. Namun, konteks penelitian tersebut yang berbasis komoditas sereal di Afrika tentu memiliki perbedaan dengan kondisi sosial ekonomi dan sistem pertanian hortikultura di Indonesia, khususnya bawang merah. Sementara itu, penelitian Adi et al (2020) di Kabupaten Bangkalan, Madura, menggunakan pendekatan *Household Food Security Survey Module* (HFSSM) menemukan bahwa 33,4% rumah tangga berada dalam kondisi rawan pangan, dengan strategi utama berupa pembelian bahan pangan murah dan melakukan pinjaman. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji faktor-faktor penentu ketahanan pangan secara kuantitatif dan belum mengukur strategi coping menggunakan indeks terstandar. Sehingga, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengkaji faktor-faktor penentu ketahanan pangan rumah tangga petani hortikultura, khususnya bawang merah, sekaligus mengukur strategi coping menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis indeks dalam konteks lokal Madura.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mengintegrasikan metode *Coping Strategy Index* (CSI) dengan model regresi logistik biner yang sejauh ini belum banyak diterapkan pada studi rumah tangga petani bawang merah di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. *Coping Strategy Index* (CSI) digunakan untuk mengukur respons adaptif rumah tangga dalam menghadapi kerawanan pangan, yang tercermin dalam berbagai strategi seperti mengurangi porsi dan frekuensi makan, mengonsumsi pangan yang lebih murah dan kurang disukai, meminjam makanan atau uang, hingga mencari sumber pendapatan tambahan, sementara regresi logistik biner digunakan untuk menilai variabel independen yang paling memengaruhi ketahanan pangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja strategi coping yang dilakukan rumah tangga petani bawang merah dalam menghadapi kerawanan pangan?

2. Bagaimana tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani bawang merah di Kabupaten Sampang, Madura?
3. Faktor apa saja yang memengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani bawang merah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi coping rumah tangga petani bawang merah.
2. Mengukur dan menganalisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani bawang merah menggunakan *Coping Strategy Index* (CSI).
3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga bawang merah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang ketahanan pangan, ekonomi pertanian, dan agribisnis dengan menghadirkan bukti empiris dari rumah tangga petani hortikultura. Serta menjadi dasar rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji ketahanan pangan pada sektor hortikultura atau wilayah dengan kondisi sosial-ekonomi serupa.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan gambaran nyata tentang kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani bawang merah di Kabupaten Sampang sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pangan daerah.